



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

URGENSI INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH

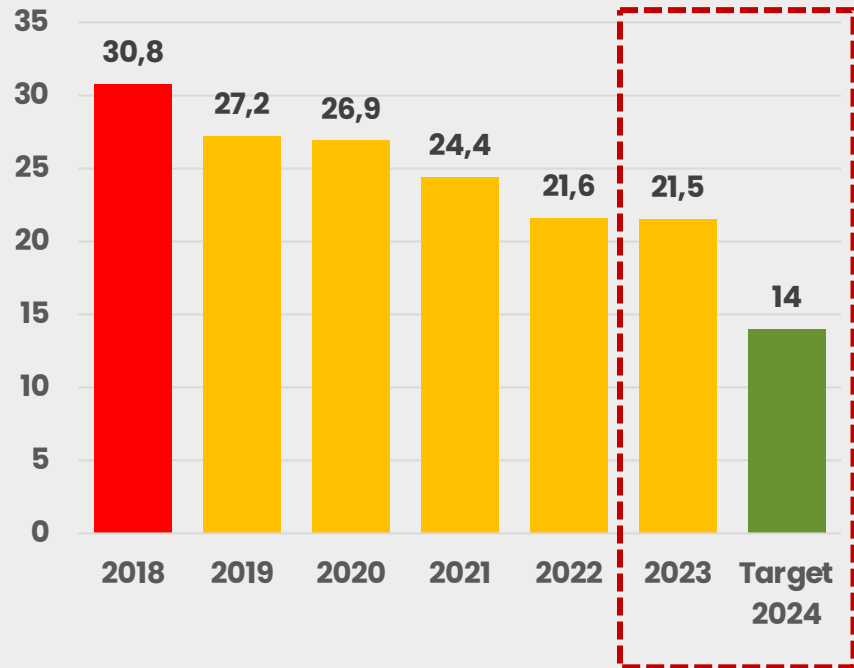
DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP

**DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

WAKIL KETUA TIM PELAKSANA BIDANG ADVOKASI DAN KEPEMIMPINAN, TPPS PUSAT

**TEMU REGIONAL
KONSOLIDASI INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH TAHUN 2024
Surabaya, 20 Mei 2024**

PENCAPAIAN PPS TAHUN 2023



**Untuk dapat mencapai target 14%,
prevalensi stunting harus turun
sebesar 7,5% dalam 1 tahun**

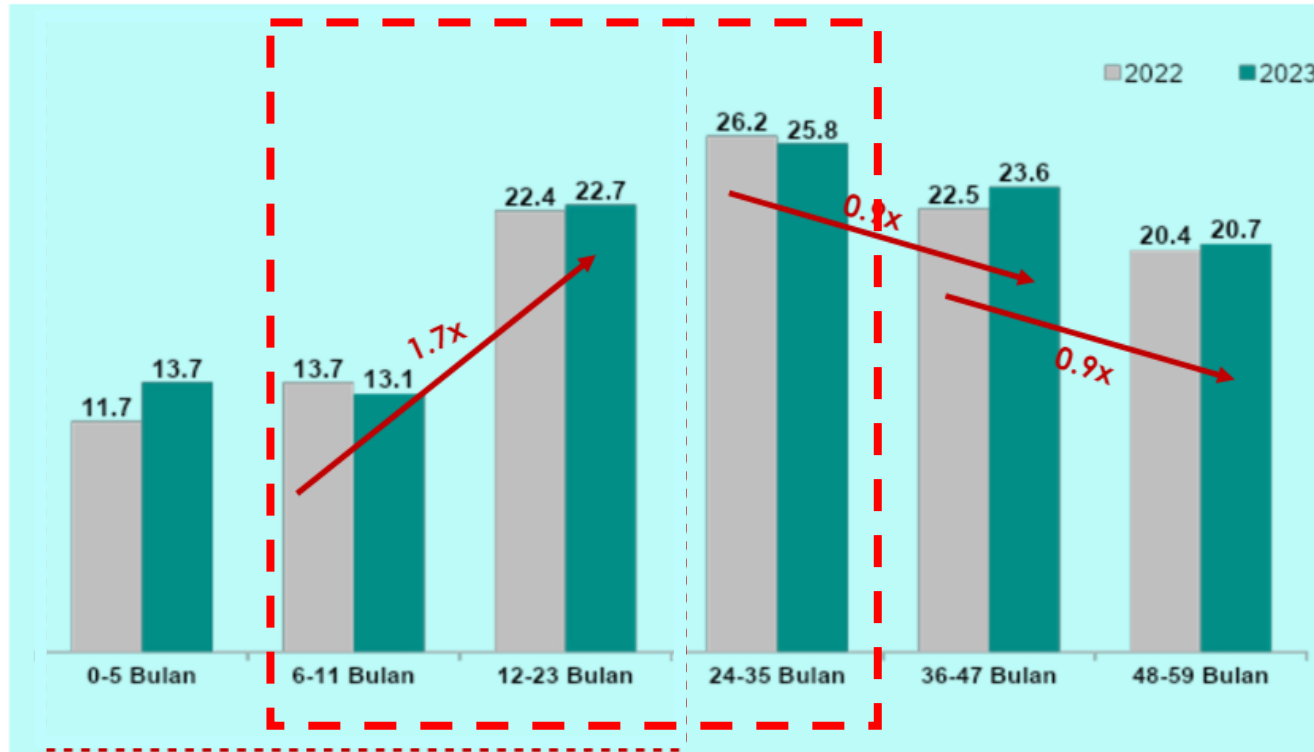
Sumber Data: Riskesdas 2018, SSGBI tahun 2019, Pemodelan 2020, SSGBI tahun 2021, SSGBI tahun 2022, SKI 2023

- **Terjadi pelambatan** penurunan prevalensi stunting dalam 2 tahun terakhir. Prevalensi tahun 2023 hanya turun sebesar 0.1% poin dari tahun 2022 (SKI, 2023).
- **Arahan Wakil Presiden** pada Rapat Tim Pengarah dan Pelaksana TPPS Pusat 19 Maret 2024: "Harus **dilakukan analisis** mengapa terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting pada 2 tahun terakhir?"
- Dengan mempertimbangkan kondisi di atas dan waktu yang tersedia untuk implementasi program, nampaknya target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 **akan sulit dicapai**.
- Harus dilakukan inovasi dan Upaya optimal untuk memastikan pencapaian target



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TITIK KRITIS KENAIKAN PREVALENSI ANAK STUNTING TAHUN 2023



Titik kritis kenaikan prevalensi stunting:
NAIK HAMPIR 2 KALI LIPAT

- Berdasarkan data SSGI 2022 dan SKI 2023, prevalensi stunting mengalami **kenaikan pada usia 6 bulan ke 12 bulan & 24 bulan**. Ini menunjukkan bahwa anak usia tersebut **tidak mendapatkan intervensi yang mencukupi**
- Ke depan, intervensi harus fokus pada **pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)** untuk mencegah terjadinya stunting, seperti:
 - pemberian **Makanan Pendamping ASI** yang bergizi seimbang dan tepat → berdasarkan SUSENAS 2023, **baru 59,33%**
 - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)** → berdasarkan SUSENAS 2023 **baru 63,58%** **Baduta** menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);
 - perbaikan praktek pengasuhan**;
 - pencegahan kecacingan**; dan lainnya

ARAHAN WAPRES PADA RAPAT TIM PENGARAH DAN PELAKSANA TPPS, 19 Maret 2024



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

1. Data penghitungan penurunan stunting dikaji lagi yang dihasilkan SKI 2023, melalui **perluasan penghitungan hasil survey e-PPGBM** yang lebih akurat
2. Koordinasi perlu dilakukan khususnya untuk program **pemberian makanan tambahan** (PMT)
3. Perpres 72/2021 terus berjalan hingga tahun 2024 untuk selanjutnya kelembagaan di daerah **dipimpin langsung oleh Kepala Daerah**
4. **Intervensi diprioritaskan pada 3 karakter daerah** (1) 5 provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi (Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Banten); (2) 7 provinsi dg angka prevalensi tinggi; dan (3) daerah dengan kapasitas fiskal rendah
5. **Insentif fiskal** perlu dieksplisitkan untuk daerah-daerah berprestasi perlu diberikan secara kuartalan atau semesteran, legal basisnya juga diperkuat
6. **Optimalkan musyawarah desa (musdes)** untuk pemantapan PPS di tingkat desa dan bagaimana alokasi **dana desa diprioritaskan** untuk stunting
7. **Legal basis anggaran penurunan stunting** dapat ditetapkan melalui Inpres
8. Perlu perubahan strategi, menggunakan **pendekatan targeting**, tidak lagi berbasis intervensi spesifik dan sensitif

PERUBAHAN ISTILAH BULAN TIMBANG



BULAN TIMBANG



**INTERVENSI SERENTAK
PENCEGAHAN
STUNTING**

- Ke depannya penimbangan tidak dilakukan hanya saat bulan timbang saja, melainkan akan dilakukan **secara bulanan dan berkelanjutan** → jadi istilah Bulan Timbang menjadi tidak relevan”
- Rugi kalau hanya sebatas penimbangan saja, maka setiap bulan akan dilakukan **penimbangan dan pengukuran**, sekaligus akan **menjadi basis data intervensi** → disepakati perubahan istilah menjadi **INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING**

BEBERAPA CATATAN TAMBAHAN

- **Pemahaman antar pelaku di lapangan masih beragam**, sehingga mengakibatkan intervensi yang tidak sama, maka diperlukan **kesamaan pengetahuan PPS dari para pelaku di lapangan.**
- **Perlu peningkatan kapasitas dan sinergitas pelaku di lapangan.**
- **Perlu dilakukan penajaman dan sinkronisasi antar program**, sehingga konvergensi antar program terjadi hingga ke tingkat rumah tangga
- **Perlu dilakukan peningkatan cakupan intervensi baik spesifik dan sensitif serta pendampingan pada kelompok sasaran, terutama keluarga 1000 HPK** (Bumil, Ibu menyusui dan Anak Balita).
- **Pemantauan pelaksanaan program harus terus diperbaiki**, baik dari sisi akurasi data, waktu, dan pemanfaatannya untuk perbaikan pelaksanaan program.



ARAHAN WAPRES PADA RAPAT RAKERNAS BANGGA KENCANA DAN PPS 2024, 25 April 2024



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

- 1. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi.** Evaluasi ini penting, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya. saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan *stunting* semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi.
- 2. Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya *stunting* baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak *stunting*. Arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan *stunting*.**
- 3. Agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan *stunting*, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.**

INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING: UPAYA UNTUK MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET

- 100% balita ditimbang dan diukur
 - 100% ibu hamil diukur LILA dan IMT
- (**< 12 minggu**) pada bulan **Juni 2024**

- **BALITA BERMASALAH GIZI** (Tinggi dan Berat Badan Kurang, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting)
- **IBU HAMIL KEK dan/atau RISIKO KEK**

semua balita bermasalah gizi dan bumil KEK terujuk

semua balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat tatalaksana

- Semua dimonitor oleh kader Posyandu, KPM, TPK
- Semua Puskesmas melakukan pencatatan dan pelaporan
- Semua Desa/Kelurahan memfasilitasi kebutuhan pendukung tatalaksana
- TPPS melakukan monitoring

- **80% balita yang mendapat tatalaksana membaik status pertumbuhan maupun status gizinya**

- **80% ibu hamil KEK yang mendapat tatalaksana naik BB nya sesuai target**

**OUTCOME :
PENURUNAN
JUMLAH
BALITA
STUNTING
BARU**

ENABLING ENVIRONMENT

keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat bantuan sosial tunai/ non tunai

keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK di kecamatan rawan pangan mendapat bantuan pangan

balita bermasalah gizi dan bumil KEK memiliki jaminan sosial

keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat akses sanitasi dan air bersih

- semua posyandu melaksanakan penyuluhan saat penimbangan dan pengukuran serentak
- semua ibu atau pengasuh balita dan ibu hamil mendapat edukasi
- semua Puskesmas melakukan pencatatan dan pelaporan

LANGKAH STRATEGIS IMPLEMENTASI 10 PASTI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH TAHUN 2024



INSTRUMEN PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH

- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3/316/Bangda tanggal 13 Mei 2024 Tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak** yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota → memberikan penjelasan tentang tujuan pelaksanaan kegiatan dan meminta setiap kepala daerah melaksanakan 10 Pasti dalam pelaksanaan intervensi serentak
- **Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak** yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perwakilan BKKBN, Satgas TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PLKB → memerintahkan untuk mendukung pelaksanaan intervensi serentak sesuai tugas nya dan melaporkan pelaksanaannya kepada TPPS Pusat
- **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Di Daerah** → sedang dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Kemenkes
- **Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah** → sedang dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK



BEBERAPA CATATAN PENUTUP

- **Untuk dapat mencapai target 14% pada tahun 2024, prevalensi stunting harus turun sebesar 7,5% poin dalam 1 tahun terakhir, walaupun target ini sangat berat untuk dicapai, namun harus tetap diupayakan bersama**
- **Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah penting dilakukan untuk memastikan semua kelompok sasaran terdata dengan baik dan menerima semua intervensi yang diperlukan, sehingga prevalensi stunting bisa diturunkan serendah mungkin**
- **Upaya intervensi serentak pencegahan stunting di daerah memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga perlu ada koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya di lapangan**
- **Hasil pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah akan dipantau dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah TPSS Pusat**



TERIMA KASIH